

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketimpangan politik, ekonomi, sosial-budaya dan agama dapat menimbulkan kecemburuan terhadap pihak tertentu. Hal tersebut menyebabkan adanya keinginan masyarakat di dalam suatu negara untuk mempunyai suatu bentuk otoritas sendiri dalam mengatur wilayahnya.<sup>1</sup> Keinginan-keinginan tersebut ditunjukkan dengan adanya pemberontakan dan gerakan separatis oleh masyarakat yang merasa dirugikan.

Gerakan separatis di Sri Lanka diawali dengan konflik horizontal.<sup>2</sup> Konflik dilatarbelakangi oleh dua etnis besar di Sri Lanka, yaitu etnis Sinhala sebagai etnis pribumi dengan populasi sebanyak 74 persen dan etnis Tamil yang merupakan pendatang dari India sebanyak 18 persen.<sup>3</sup> Pada tahun 1796, Inggris di bawah naungan *British East India Company* menjajah Sri Lanka. Pada tahun tersebut, Inggris mengirim Tamil India untuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja dengan upah yang rendah di perkebunan Sri Lanka. Masuknya Tamil secara

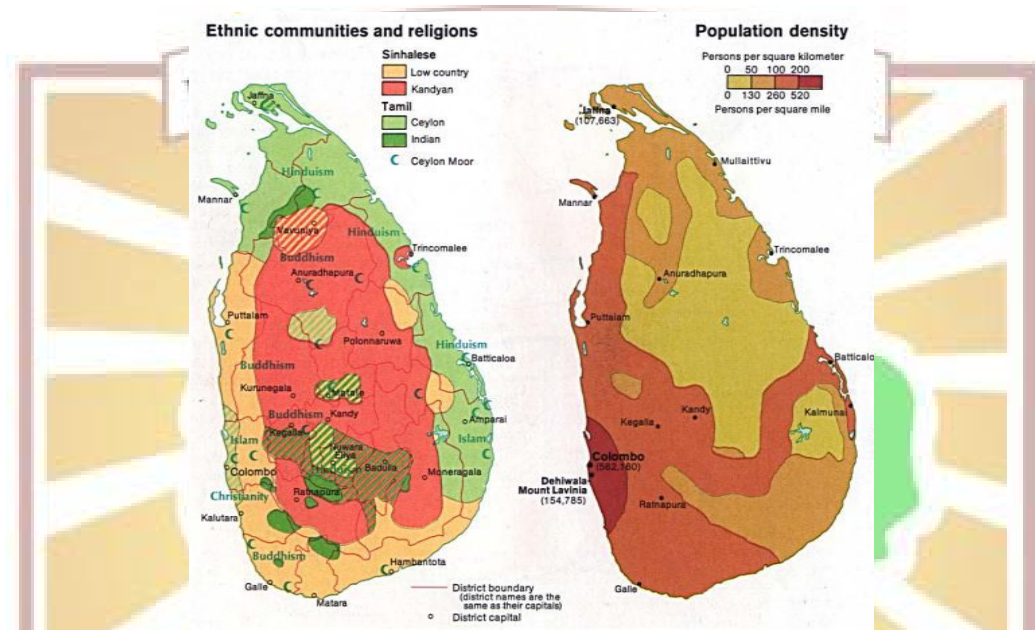
<sup>1</sup> Wahyu Pratiwi, *Kebijakan Pemerintah Thailand menjadikan Indonesia sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Thailand Selatan*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2009, 4-5

<sup>2</sup> Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara kelompok agama, kelompok pendatang dengan penduduk asli, kelompok etnis atau suku dan organisasi bisnis yang berada di lokasi setempat.

<sup>3</sup> Jeremy Barnicle, et al, "Securing Peace: An Action Strategy for Sri Lanka", *A Report Prepared by the Workshop on Post-Conflict Reconstruction Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University for the Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, 9.

besar-besaran di Sri Lanka menimbulkan ketidaksukaan bagi Sinhala karena Tamil banyak mengisi lapangan pekerjaan di Sri Lanka.<sup>4</sup>

**Gambar 1.1 Persebaran Etnis di Sri Lanka**



Sumber: Ethnic communities and religious  
[http://www.reisenett.no/map\\_collection/islands\\_oceans\\_poles/Sri\\_Lanka\\_charts\\_76.jpg](http://www.reisenett.no/map_collection/islands_oceans_poles/Sri_Lanka_charts_76.jpg)

Setelah kemerdekaan Sri Lanka pada 4 Februari 1948, Sri Lanka mulai menunjukkan stabilitas politiknya. *Tamil Political Party* dan *Tamil Congress* bergabung dengan *United National Party* (UNP) sebagai koalisi dalam pemerintahan sehingga Sinhala dan Tamil memegang posisi yang hampir sama di pemerintahan. Ketegangan etnis mulai meningkat saat Sinhala memandang bahwa Tamil menduduki posisi yang terlalu besar dalam pemerintahan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> *Simulation on Sri Lanka: Setting the Agenda for Peace*, United States Institute of Peace, 2003, 9.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pada tahun 1948, UNP melalui parlemen mengesahkan undang-undang mengenai kewarganegaraan Sri Lanka, namun Tamil tidak termasuk dalam kategori warga negara Sri Lanka dalam undang-undang tersebut.<sup>6</sup> Hal ini menyebabkan rasa diskriminasi yang tumbuh semakin kuat bagi Tamil yang menyebabkan perpecahan dalam koalisi, beberapa pihak dari *Tamil Congress* memutuskan keluar dari koalisi dan membentuk *Federal Party* pada 1949.<sup>7</sup>

Permasalahan etnis meningkat ketika Perdana Menteri Sri Lanka, Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike, memperkenalkan "*Sinhala Only Language Act*" pada tahun 1956 yang menjadikan bahasa Sinhala sebagai bahasa nasional Sri Lanka menggantikan bahasa Inggris yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan dan ketenagakerjaan negara (tercantum dalam UU No. 33 tahun 1956).<sup>8</sup> Kebijakan tersebut dinilai oleh Tamil sebagai cara Sinhala untuk mengurangi akses Tamil di pemerintahan, juga sebagai instrumen penindasan dan penyangkalan terhadap Tamil serta merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sri Lanka dalam menjadikan identitas Sinhala sebagai identitas nasional Sri Lanka.<sup>9</sup>

*Sinhala Only Language Act* direspon oleh Tamil dengan dikeluarkannya Resolusi Vaddukoddai pada 1976 sebagai pernyataan Tamil untuk memisahkan

---

<sup>6</sup> Ibid.

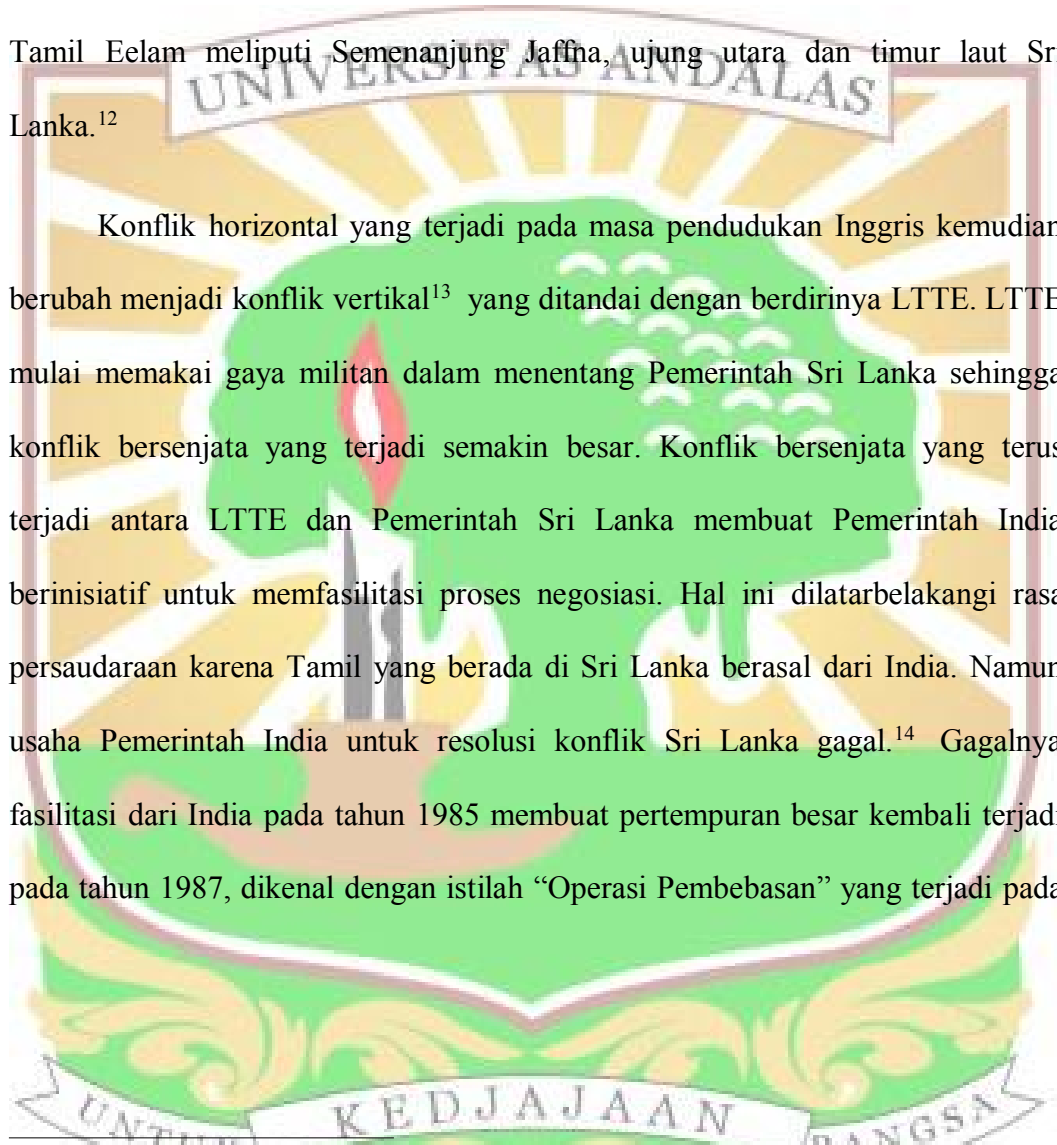
<sup>7</sup> Joanne Richard, "An Institutional History of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)", *Center on Conflict, Development and Peace Building*, The Graduate Institute Geneva, 10.

<sup>8</sup> Neil DeVotta, *Blowback: Linguistic Nationalism, Institutional and Ethnic Conflict in Sri Lanka*, (Stanford University Press:USA, 2004), 43.

<sup>9</sup> Syed Rifaat Hussain, "Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE): Failed Quest for a Homeland," dalam *Violent Non-State Actors in World Politics*, ed. Klejda Mulaj (New York: Columbia University Press, 2010), 388.

diri dari Sri Lanka.<sup>10</sup> Protes dari Tamil kemudian disalurkan melalui *Liberation Tiger of Tamil Eelam* (LTTE) pada tahun 1976 dengan pimpinannya yaitu Velupillai Parabhakaran.<sup>11</sup> Velupillai Parabhakaran sebagai pemimpin LTTE mengatakan bahwa LTTE akan memperjuangkan pembentukan negara bagi Tamil Eelam meliputi Semenanjung Jaffna, ujung utara dan timur laut Sri Lanka.<sup>12</sup>

Konflik horizontal yang terjadi pada masa pendudukan Inggris kemudian berubah menjadi konflik vertikal<sup>13</sup> yang ditandai dengan berdirinya LTTE. LTTE mulai memakai gaya militan dalam menentang Pemerintah Sri Lanka sehingga konflik bersenjata yang terjadi semakin besar. Konflik bersenjata yang terus terjadi antara LTTE dan Pemerintah Sri Lanka membuat Pemerintah India berinisiatif untuk memfasilitasi proses negosiasi. Hal ini dilatarbelakangi rasa persaudaraan karena Tamil yang berada di Sri Lanka berasal dari India. Namun usaha Pemerintah India untuk resolusi konflik Sri Lanka gagal.<sup>14</sup> Gagalnya fasilitasi dari India pada tahun 1985 membuat pertempuran besar kembali terjadi pada tahun 1987, dikenal dengan istilah “Operasi Pembebasan” yang terjadi pada



<sup>10</sup> Dudley Senanayake Pact, [http://www.sangam.org/FB\\_HIST\\_DOCS/D-C%20Pact.html](http://www.sangam.org/FB_HIST_DOCS/D-C%20Pact.html), (diakses pada 25 Desember 2015)

<sup>11</sup> Fikri Anderanto, *Peran Norwegia Terhadap Gerakan Perdamaian Antara Gerakan Separatis Macan Tamil dan Sri Lanka 2000-2003*, (Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta), 2008, 48.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Konflik vertikal merupakan konflik antara kelompok pemerintah dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat tertentu. Asumsinya, konflik terjadi dikarenakan pembuatan kebijakan pemerintah yang tidak partisipatif dan pada tahap berikutnya memunculkan perbedaan pendapat, pertentangan dan kekerasan seperti timbulnya gerakan separatisme.

<sup>14</sup> Agustina Siregar, *Konflik Tamil-Sinhala: Pengaruhnya Terhadap Hubungan Sri Lanka-India (1977-1984)*, (Skripsi: Universitas Indonesia), 2001, 46-48.

bulan Mei hingga Juni yang ditujukan untuk merebut wilayah Vadamarachchi di Semenanjung Jafna dari pihak LTTE.<sup>15</sup>

Terpilihnya Chandrika Kumaratunga sebagai presiden pada pemilu 1994 membawa harapan baru pada proses perdamaian yang disebut sebagai *Pro-Peace Agenda*. Gerakan masal kampanye perdamaian untuk mengakhiri konflik lantang disuarakan. Pembicaraan damai dengan LTTE juga direncanakan, namun LTTE tidak bersedia membahas proses perdamaian. Usaha negosiasi dari Pemerintah Sri Lanka berakhir saat LTTE menenggelamkan dua kapal perang Angkatan Laut Sri Lanka pada tahun 1995.<sup>16</sup>

*Pro-Peace Agenda* berubah menjadi *War For Peace Policy*, di mana militer kembali menjadi aspek utama Pemerintah Sri Lanka dalam menghadapi perlawanan LTTE.<sup>17</sup> Kebijakan tersebut membuat skala perang yang terjadi menjadi besar dan menyebabkan banyaknya tentara dari kedua belah pihak tewas dalam pertempuran tersebut.

**Tabel 1.1 Jumlah Korban Tewas dalam Konflik Sri Lanka Tahun 1997-2000**

Tahun	Korban Tewas	Jenis Korban
1997	4000	Kombatan
1998	2000	Kombatan
1999	2000	Kombatan
2000	2400	Kombatan

Sumber: *Armed Conflict Report, "Sri Lanka 1983-First Combat Deaths"*  
[http://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/02/25/Sri\\_Lanka.pdf](http://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/02/25/Sri_Lanka.pdf)

<sup>15</sup> Hafidh Nursatria, Puji Wahono, Supriyadi, "Kekuatan Macan Tamil Pasca Kekalahannya Melawan Tentara Sri Lanka Pada Mei 2009", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember*, 9.

<sup>16</sup> Rajanayagam, "Govt-LTTE Negotiations 1994-1995: Another Lost Opportunity", dalam Kumar Rupesinghe, "Negotiating Peace in Sri Lanka: Efforts, Failures and Lessons", Vol 2, 157.

<sup>17</sup> Ibid

Reaksi militer yang diberikan oleh Pemerintah Sri Lanka serta banyaknya kombatan yang tewas dari kedua belah pihak tidak menghentikan aksi dari LTTE. Konflik bersenjata tersebut juga menyebabkan kondisi ekonomi Sri Lanka menjadi menurun, salah satunya disebabkan oleh *Investment Promotion Zone Program* yang gagal karena hancurnya berbagai infrastruktur penunjang program investasi serta kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil.<sup>18</sup>

Pemerintah Sri Lanka kemudian memilih jalan damai dengan meminta bantuan kepada Pemerintah Norwegia untuk menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik tersebut. Ide untuk melibatkan pihak ketiga dipelopori oleh Presiden Chandrika Kumaratunga pada tahun 1998. Tujuan awal yang ingin dicapai dari kerja sama dengan Norwegia adalah agar disepakatinya gencatan senjata sehingga kondisi menjadi lebih kondusif.<sup>19</sup>

Dipilihnya Norwegia sebagai pihak ketiga karena Norwegia merupakan negara yang aktif dalam misi perdamaian sejak awal 1990-an. Norwegia banyak terlibat dalam usaha resolusi konflik, di antaranya adalah Norwegia berperan besar dalam proses perdamaian di Guatemala pada awal tahun 1990, Norwegia juga menjadi fasilitator dalam proses perdamaian Israel dan Palestina pada tahun 1992, serta di Filipina, Sudan, Kolombia, dan Haiti pada tahun 1998.<sup>20</sup> Keterlibatan Norwegia dalam konflik Sri Lanka juga disebabkan oleh kerja sama ekonomi. Terjalannya kerja sama ekonomi antara Norwegia dan Sri Lanka dimulai pada tahun 1977 yang berada di bawah kerangka *Norwegian Agency for*

---

<sup>18</sup> Fikri Andreanto, 58-59.

<sup>19</sup> Kristen Høglund, "Violence and the Peace Process in Sri Lanka", *Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden*. Vol 07, No 2, 2005, 5.

<sup>20</sup> Jon Hanssen-Bauer, *The Norwegian "model" for conflict resolution*, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, 2005, 2-3.

*Development Cooperation* (NORAD).<sup>21</sup> Situasi politik dan keamanan yang tidak stabil di Sri Lanka akan mempengaruhi investasi yang telah ditanamkan Norwegia di Sri Lanka.<sup>22</sup> Selain itu, upaya Norwegia untuk dapat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2001-2002 tentu akan menjadi pertimbangan Norwegia untuk terlibat dalam upaya perdamaian konflik Sri Lanka agar meningkatkan reputasi Norwegia dalam politik internasional.<sup>23</sup>

Upaya penyelesaian konflik separatis di Sri Lanka akhirnya mendapat jalan terang pada Februari 2002. Kesepakatan gencatan senjata antara Pemerintah Sri Lanka dan pihak LTTE tercantum dalam sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani secara terpisah.<sup>24</sup> LTTE diwakili oleh Velupillai Prabhakaran yang menandatangani MoU gencatan senjata pada 21 Februari 2002 di Kantor Administrasi Politik LTTE di Kilinocchi sedangkan Sri Lanka diwakili oleh Perdana Menteri Ranil Wikremesinghe yang menandatangani MoU pada 22 Februari di Vavuniya. MoU ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Norwegia, Jan Petersen, pada konferensi pers di Oslo pada 24 Februari 2002.<sup>25</sup> Di dalam MoU tersebut, dibentuk empat artikel yang berisi:<sup>26</sup>

<sup>21</sup> Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) merupakan direktorat dibawah Kementerian Luar Negeri Norwegia. NORAD menjadi pusat pembangunan dan keahlian dan membantu memastikan efisiensi dalam bantuan pembangunan. NORAD menyalurkan dana melalui organisasi non-pemerintah Norwegia. NORAD juga bekerja sama dengan perusahaan Norwegia dan perserikatan dagang.

<sup>22</sup> Anastasia Hiyang, "Upaya Norwegia dalam Penyelesaian Konflik Etnis di Sri Lanka 2002-2003", *eJournal Hubungan Internasional*, Vol.01. No.2, 2013, 237.

<sup>23</sup> DEPLU RI, Laporan Tahunan KBRI Norwegia, 2000, 20-21.

<sup>24</sup> \_\_\_\_ "Conflict and Development: Development Assistance Strategy for Peace Building and Reconstruction in Sri Lanka", *JBIC Institute Japan Bank for International Cooperation*, Research Paper No.24, 23.

<sup>25</sup> MoU Agreement between the Government and LTTE, <http://www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/document/papers/memorandum2002.htm>, (Diakses pada 5 Januari 2016).

<sup>26</sup> Ibid.

1. Kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pada 23 Februari 2002 semenjak disepakatinya MoU oleh Pemerintah Sri Lanka dan LTTE.
2. Kedua belah pihak harus membangun rasa saling percaya agar kondisi kembali normal.
3. Membentuk tim pemantau independen dalam kerangka *Sri Lanka Monitoring Mission* (SLMM) yang beranggotakan Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark, dan Islandia untuk memantau perjanjian. Kedua belah pihak harus memberikan pemberitahuan dalam dua minggu apakah mereka akan mengikuti atau menarik diri dari perjanjian.
4. Setelah diberlakukannya perjanjian, perjanjian dapat dimodifikasi sesuai dengan kesepakatan pihak yang terlibat.

Setelah kondisi relatif stabil dalam masa gencatan senjata, pada September 2002, dimulai putaran perundingan dalam upaya mengakhiri konflik dimulai. Namun strategi mediasi yang dilakukan oleh Norwegia tidak terlepas dari berbagai masalah yang muncul dalam masa gencatan senjata.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlarut-larutnya konflik bersenjata antara Pemerintah Sri Lanka dan *Liberation Tiger of Tamil Eelam* (LTTE) menunjukkan bahwa Pemerintah Sri Lanka tidak mampu menyelesaikan konflik menghadapi LTTE. Hal tersebut membuat Pemerintah Sri Lanka meminta bantuan kepada pihak ketiga yaitu Norwegia untuk resolusi konflik Sri Lanka. Kesepakatan gencatan senjata pada Februari 2002 menjadi sebuah titik balik dalam proses resolusi konflik Sri Lanka. Hal ini menjadi modal awal bagi Norwegia untuk melanjutkan proses



perundingan dengan kedua belah pihak. Pada September 2002, berbagai perundingan dimulai dengan bantuan Norwegia sebagai mediator.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang serta rumusan masalah, maka penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

**“Bagaimana strategi Norwegia dalam mediasi konflik bersenjata antara Pemerintah Sri Lanka dengan *Liberation Tiger of Tamil Eelam (LTTE)*”**

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Norwegia dalam mediasi konflik bersenjata antara Pemerintah Sri Lanka dengan *Liberation Tiger of Tamil Eelam (LTTE)*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Menganalisis bagaimana pihak ketiga memposisikan diri dalam konflik. Disepakatinya gencatan senjata setelah bergabungnya pihak ketiga dalam penyelesaian konflik menjadi prestasi tersendiri. Cara Norwegia memposisikan diri dalam konflik Sri Lanka dapat juga menjadi tolak ukur untuk penanganan konflik lainnya yang turut melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian konfliknya
2. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan data bagi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang terkait dengan permasalahan yang diteliti khususnya kajian resolusi konflik

## 1.6 Kajian Pustaka

Untuk menganalisis judul yang diangkat, peneliti mencoba untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan pijakan bagi penulis. Secara umum, penelitian mengenai resolusi konflik Sri Lanka telah dibahas dalam bentuk karya ilmiah, baik buku maupun jurnal ilmiah.

Kajian pustaka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah tulisan dari Mariamah yang berjudul *Transnasionalisasi Jaringan Teror Domestik Studi Kasus LTTE*.<sup>27</sup> Dalam tulisannya, dijelaskan bahwa berbagai negara telah menyatakan kekhawatiran mereka terhadap gerakan terorisme LTTE. Pergerakan LTTE terdeteksi di berbagai negara. Departemen Luar Negeri Sri Lanka mengidentifikasi gerakan LTTE yang tersebar di Australia, Kanada, Asia, Eropa, India, Timur Tengah, Afrika Selatan serta Amerika Serikat (AS).<sup>28</sup> Berbagai negara telah mengeluarkan pernyataan yang memasukkan LTTE ke dalam daftar organisasi teroris internasional yaitu India, AS, Kanada, Dewan Uni Eropa serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini merupakan wujud dari upaya masyarakat internasional dalam membatasi gerak LTTE.<sup>29</sup> LTTE dinilai memiliki berbagai macam teknik serta taktik penyerangan dan yang perlu diperhatikan adalah koordinasi dan kesatuan operasi LTTE, baik dalam pembelian senjata, taktik perang, maupun pendanaan yang tertata dengan rapi.<sup>30</sup> Perbedaan penelitian ini dengan *Transnasionalisasi Jaringan Teror Domestik*

---

<sup>27</sup> Mariamah, *Transnasionalisasi Jaringan Teror Domestik Studi Kasus LTTE*, (Tesis: Universitas Indonesia, 2012).

<sup>28</sup> Ibid., 4.

<sup>29</sup> Ibid., 5.

<sup>30</sup> Ibid., 43.

*Studi Kasus LTTE* adalah penelitian tersebut hanya membahas mengenai dikategorikannya LTTE sebagai organisasi teroris internasional serta berbagai aksi yang dilakukan LTTE dalam menghimpun dana untuk melawan pemerintahan. Tulisan ini dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai pandangan masyarakat internasional terhadap aktivitas LTTE yang memperjuangkan pembentukan negara berdaulat bagi Tamil Eelam yang dianggap sebagai gerakan terorisme internasional oleh berbagai pihak.

Kajian pustaka selanjutnya yaitu jurnal *Nordic Approaches to Peace Mediation: Research, Practises and Policies* yang ditulis oleh Markho Lethi dan Jenny Saarinen dalam artikel “*Nordic Model: Norway as a Peace Nation*”.<sup>31</sup> Dalam artikel tersebut dijelaskan Norwegia membangun jalan baru sebagai *peacebuilders* dan menjadikan diplomasi perdamaian sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri tahun 1990-an.<sup>32</sup> Konflik antara Israel dan *Palestinian Liberation Organization* (PLO) banyak menarik perhatian masyarakat internasional. Banyak usaha dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengakhiri konflik antara Israel dan PLO, namun tidak mengikutsertakan PLO dalam setiap usaha perdamaian yang dilakukan. AS memulai upaya perdamaian dengan diadakannya Kongres Perdamaian di Madrid pada Oktober 1991 yang ditandai dengan dimulainya hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab. Namun, dalam kongres tersebut, pemberontak sama sekali tidak dilibatkan

---

<sup>31</sup> Markho Lethi dan Jenny Saarinen, “Nordic Approaches to Peace Mediation: Research, Practises and Policies”, *TAPRI Studies in Peace Conflict Research* No. 101, 2014.

<sup>32</sup> Ibid., 56

sehingga kongres tersebut tidak membawa perubahan yang signifikan dalam konflik Israel dan PLO.<sup>33</sup>

Norwegia muncul dengan pendekatan baru dalam diplomasi perdamaian dan praktek mediasi yang dimulai melalui *Oslo Back Channel* pada tahun 1993 di mana Norwegia memainkan peran sentral sebagai fasilitator dalam konflik Israel dan PLO. Norwegia melalui diplomasi *Oslo Back Channel* mulai melakukan terobosan dengan membuka pintu untuk melakukan negoisasi dengan pemberontak dan kelompok-kelompok teroris.<sup>34</sup> Norwegia memulai keterlibatannya dalam konflik Israel dan Palestina di luar sorotan diplomasi internasional. Dua akademisi Israel, tiga wakil PLO dan beberapa pihak dari Norwegia bersama-sama di bawah naungan institusi penelitian pada 20 Januari 1993 melakukan pertemuan rahasia yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai *Oslo Back Channel*. *Oslo Back Channel* tersebut akhirnya menjadi awal disepakatinya Perjanjian Oslo di Washington pada 13 September 1993.<sup>35</sup> Meskipun tidak dapat membawa perdamaian abadi dalam konflik Timur Tengah tersebut, hal tersebut dinilai sebagai terobosan baru yang dilakukan oleh Norwegia.<sup>36</sup> Tulisan Markho Lethi dan Jenny Saarinen dapat memberikan kontribusi karena dapat memberikan gambaran mengenai gaya diplomasi perdamaian yang dilakukan oleh Norwegia, berbeda dari pihak lainnya Norwegia berani mengajak pemberontak atau organisasi terorisme untuk terlibat dalam negoisasi agar keluhan-keluhan dari pemberontak atau terorisme dapat didengar.

---

<sup>33</sup> Ibid., 57.

<sup>34</sup> Ibid., 57-58

<sup>35</sup> Ibid., 59.

<sup>36</sup> Ibid., 58.

Kajian pustaka ketiga adalah jurnal *Contemporary South Asia*, dalam artikel yang ditulis oleh Kristine Høglund dan Isak Svensson, “*Mediating Between Tigers and Lions: Norwegian Peace Diplomacy in Sri Lanka’s Civil War*”<sup>37</sup>, dalam bagian ini dijelaskan bahwa masuknya mediator luar pada konflik internal tidak hanya bergantung kepada ketersediaan pihak luar untuk campur tangan dalam permasalahan tersebut, tetapi juga pada ketersediaan kelompok separatis dalam menerima mediator tersebut. Untuk pihak yang terlibat konflik, ada beberapa manfaat dalam melakukan mediasi, yaitu:<sup>38</sup>

1. Konflik yang terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang pasti membuat pihak-pihak yang berkonflik merasa tidak mampu dalam menyelesaikan konflik sendiri. Hal tersebut menyebabkan pihak yang terlibat menjadi lebih terbuka terhadap bantuan mediator dari pihak luar
2. Pemerintah serta pihak pemberontak merasa lebih optimis terhadap potensi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Hal ini membuat mediasi menjadi lebih menarik daripada perjuangan bersenjata

Dalam konflik internal, terdapat asimetris dasar yang mempengaruhi pemilihan mediator. Pemerintah yang memiliki dominasi kekuasaan dari segi legitimasi dan pengakuan internasional merupakan pihak yang berperan besar terhadap pemilihan mediator.<sup>39</sup> Selanjutnya juga dibahas mengapa Norwegia yang menjadi mediator dalam konflik Sri Lanka. Pemilihan mediator bergantung pada permintaan dan penawaran dari mediator. Dengan kata lain, mediasi terjadi jika ada minat dari mediator untuk berfungsi sebagai pihak yang akan

<sup>37</sup> Kristine Høglund dan Isak Svensson, “*Mediating Between Tigers and Lions: Norwegian Peace Diplomacy in Sri Lanka’s Civil War*”.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 178.

<sup>39</sup> *Ibid.*

menciptakan perdamaian dan secara bersamaan ada minat dari pihak-pihak yang berkonflik untuk meminta mediasi pihak ketiga dari mediator tertentu. Faktor di balik upaya Norwegia dalam menjadi mediator tidak hanya demi kepentingan Norwegia saja tetapi juga penerimaan Norwegia oleh pihak yang berkonflik.<sup>40</sup>

Tulisan *Mediating Between Tigers and Lions: Norwegian Peace Diplomacy in Sri Lanka's Civil War* dapat membantu penulis untuk memahai mengenai pemilihan mediator dalam konflik internal khususnya pemilihan Norwegia sebagai mediator dalam konflik Sri Lanka. Namun penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana proses mediasi yang dilakukan Norwegia terhadap konflik internal di Sri Lanka.

Kajian pustaka selanjutnya ditulis oleh Marcus Foster dengan judul "*Small States in Peacemaking Roles: Applying the 'Norwegian Model of Conflict Resolution in Sudan'*"<sup>41</sup>, Marcus Foster menjelaskan bahwa Norwegia secara khusus telah muncul sebagai negara yang sukses dalam melaksanakan misi resolusi konflik. Norwegia mematahkan asumsi bahwa negara kecil yang kekurangan sumber daya, seperti ekonomi dan militer tidak dapat memainkan peranan yang besar dalam dunia internasional.<sup>42</sup> Dalam misi resolusi konflik oleh Norwegia, ditemukan sejumlah kesamaan antara beberapa kasus resolusi konflik Norwegia yang dikenal sebagai istilah '*the Norwegian Model*', yaitu:<sup>43</sup>

1. Kepercayaan pribadi
2. Menjamin rahasia
3. Komitmen jangka panjang
4. Memberikan bantuan dana
5. Memberikan fasilitasi

<sup>40</sup> Ibid., 178-179.

<sup>41</sup> Marcus Foster, "Small States in Peacemaking Roles", *Jackson School of International Studies*.

<sup>42</sup> Ibid., 23.

<sup>43</sup> Ibid.

## 6. Netralitas

Norwegia telah memainkan peranan yang besar dalam resolusi konflik di Palestina, Guatemala, Sudan dan sebagainya. Norwegia memberikan kontribusi yang besar terhadap Perjanjian Oslo tahun 1993 antara Israel dan Palestina yang akhirnya mempengaruhi reputasi Norwegia di dunia internasional sebagai negara yang fokus dalam bidang resolusi konflik. Keterlibatan Norwegia dalam resolusi konflik Sudan menjadi salah satu keberhasilan besar Norwegia dalam resolusi konflik. Perang Sudan yang dimulai tahun 1983 menjadi salah satu konflik paling berdarah sejak Perang Dunia II.<sup>44</sup> Didorong oleh diskusi yang dilakukan oleh Norwegia dengan Pemerintah Sudan dengan *Southern People's Liberation Movement/Army* dengan menggunakan pendekatan '*the Norwegian Model*', pada tahun 2005, disepakati *Comprehensive Peace Agreement (CPA)* yang memberikan peluang lebih besar dalam usaha perdamaian konflik Sudan. Tulisan ini dapat memberikan pemahaman mengenai ciri khusus yang dimiliki oleh Norwegia dalam setiap misi resolusi konflik yang dijalankan yang dikenal dengan '*the Norwegian Model*', sedangkan perbedaan penelitian ini dengan tulisan Marcus Foster terletak pada studi kasusnya yaitu konflik Sudan.

Kajian pustaka terakhir adalah jurnal *Cooperation and Conflict*, dalam artikel "*Peace Facilitation by Small States: Norway in Sri Lanka*"<sup>45</sup>, jurnal yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh *Nordic International Studies Assosiation (NISA)* yang ditulis oleh John Stephen Moolakkatu, artikel ini membahas mengenai gencatan senjata yang akhirnya terjadi antara pemerintah dan pihak LTTE pada tahun 2002 dengan enam putaran mediasi pada September 2002 hingga Maret

---

<sup>44</sup> Ibid., 24-25.

<sup>45</sup> John Stephen Moolakkatu, "Peace Facilitation by Small States: Norway in Sri Lanka", *Cooperation and Conflict: Nordic International Studies Assosiation*, Vol 40.

2003. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa negara kecil seperti Norwegia mempunyai kesuksesan yang lebih besar sebagai mediator dibandingkan dengan negara besar lainnya. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang berkonflik terhadap Norwegia menjadi faktor penting dalam proses perdamaian. Norwegia memainkan peranan yang lebih aktif daripada seorang utusan belaka. Norwegia terlibat dalam berbagai interaksi yang bertujuan untuk menghilangkan kecurigaan antarpihak serta menjembatani kesenjangan. Norwegia juga memberikan penawaran dari bantuan donor internasional untuk membangun kembali ekonomi setelah perang dan merehabilitasi korban. Gencatan senjata telah menciptakan suasana perdamaian yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dapat dinegosiasikan.<sup>46</sup> Artikel yang diterbitkan oleh NISA ini dapat membantu penulis dalam mendapatkan data mengenai proses enam putaran mediasi yang terjadi dari tahun 2002 sampai tahun 2003. Selain itu, pemilihan Norwegia sebagai mediator oleh Pemerintah Sri Lanka juga mendapat porsi yang besar dalam tulisan ini.

## 1.7 Kerangka Konseptual

Dalam menganalisa strategi Norwegia dalam mediasi konflik bersenjata antara Pemerintah Sri Lanka dengan *Liberation Tiger of Tamil Eelam* (LTTE), penulis menggunakan beberapa konsep untuk dijadikan sebagai alat analisa yang relevan.

### 1.7.1 Mediasi

Dalam konteks hubungan internasional, konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu konflik eksternal dan konflik internal. Klasifikasi konflik ini lebih

---

<sup>46</sup> Ibid., 3-6.



ditekankan dari jumlah negara yang terlibat. Konflik eksternal melibatkan lebih dari satu negara sedangkan konflik internal terjadi dalam suatu negara.<sup>47</sup> Konflik kontemporer tidak hanya terjadi antarnegara di dunia, melainkan di dalam suatu negara yang merefleksikan melemahnya struktur negara, runtuhnya kedaulatan dan ikatan lokal dalam sistem negara.<sup>48</sup> Konflik internal merupakan hal yang kompleks sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat untuk menghentikan konflik.

Ada saat konflik berada pada situasi paling panas sehingga tidak lagi memungkinkan bagi pihak yang berkonflik untuk bertemu dalam meja perundingan. Keterlibatan pihak ketiga dalam kondisi seperti ini merupakan pilihan yang rasional. Dengan adanya pihak netral, kedua belah pihak bisa menyampaikan pandangannya masing-masing dan jika ada kekacauan dalam proses perundingan, pihak ketiga dapat menengahi perundingan tersebut serta dapat mendinginkan suasana apabila terjadi adu argumen antara kedua belah pihak. Salah satu bentuk keterlibatan pihak ketiga adalah mediasi. Mediasi memiliki beberapa ciri khusus, yaitu:<sup>49</sup>

1. Mediasi melibatkan intervensi individu, kelompok atau organisasi dalam perselisihan dua atau lebih aktor.
2. Mediasi adalah bentuk keterlibatan yang tidak menggunakan paksaan dan tidak menggunakan kekerasan.

---

<sup>47</sup> Olivier Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Mail, *Contemporary Conflict Resoluton: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*, (Polity Press: Cambridge, 2011), 17.

<sup>48</sup> Hugh Miall., 49.

<sup>49</sup> Jacob Bercovitch, *The Structure and Diversity of Mediation in International Relations*, edit by Jacob Bercovitch and Jeffrey Z. Rubbin in *Mediation in International Relations: Multiple Approach to Conflict Management*, (New York, Palgrave Macmillan: 2006), 4.

3. Mediasi adalah bentuk intervensi sukarela. Hal ini berarti pihak yang berkonflik dapat memberikan kontrol atas hasil mediasi. Pihak yang berkonflik mempunyai hak untuk menerima proposal dari mediator atau menolak untuk terlibat dalam mediasi.

4. Mediator memasuki konflik dengan mempengaruhi, mengubah, mengatasi konflik dengan beberapa tindakan.

Mediasi menurut Jacob Bercovitch merupakan proses pengelolaan konflik di mana aktor konflik atau wakil-wakil mereka meminta atau menerima bantuan yang ditawarkan, dari individu-individu, kelompok, organisasi atau negara. Bantuan dari seorang mediator tersebut diperlukan untuk mengubah, mempengaruhi persepsi atau perilaku dari pihak yang bersengketa tanpa mediator menggunakan kekuatan fisik atau otoritas hukum.<sup>50</sup> Dalam konflik Sri Lanka, mungkin sulit bagi pihak yang berkonflik untuk memberikan legitimasi terhadap masing-masing pihak. Mediator harus dapat menemukan cara agar mengatasi hal tersebut, sehingga didapatkannya kepercayaan dari masing-masing pihak dan dapat membantu membangun pemahaman umum. Mediasi juga ditujukan untuk menciptakan sebuah proses perdamaian yang mengajak pihak-pihak yang berkonflik dalam sebuah dialog.<sup>51</sup>

#### 1.7.1.1 Kerangka Strategi Model Mediasi

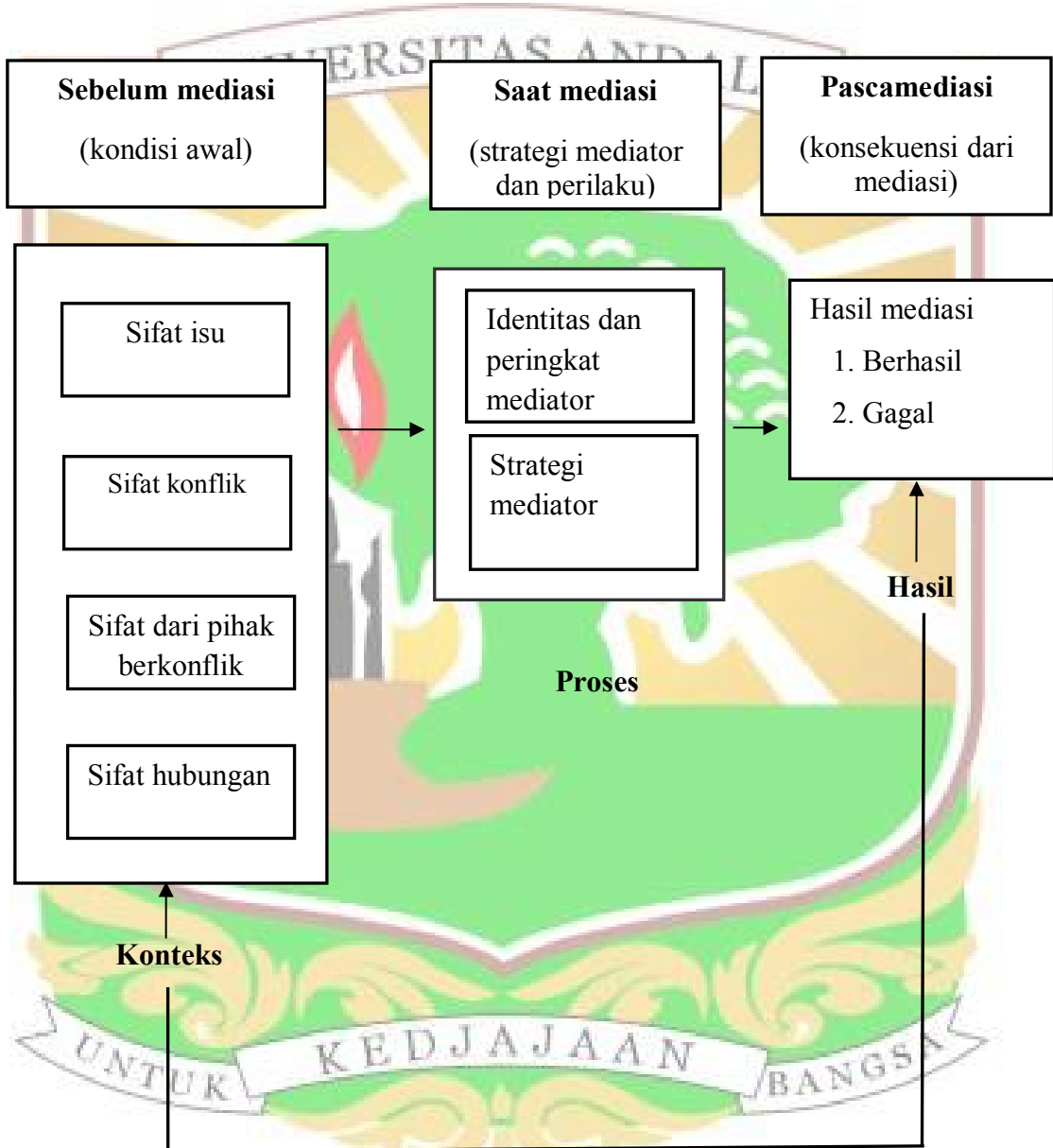
Mediator beroperasi dalam sistem untuk mengubah dan mempengaruhi konflik. Sistem tersebut dapat diidentifikasi sebagai komunikasi, pengalaman dan

<sup>50</sup> Jacob Bercovitch, *The Structure and Diversity of Mediation in International Relations*, edit by Jacob Bercovitch and Jeffrey Z. Rubin in *Mediation in International Relations: Multiple Approach to Conflict Management*, (New York, Palgrave Macmillan: 2006), 6-7.

<sup>51</sup> Mohamed Rabie, *Conflict Resolution and Ethnicity*, (Praeger Westport: London, 1994), 132.

harapan pihak yang berkonflik serta sumber daya dan kepentingan yang dimiliki oleh mediator. Interaksi antarparameter ini menentukan sifat dan efektifitas mediasi.<sup>52</sup>

**Bagan 1.1 Kerangka Strategi Model Mediasi**



Sumber: Jacob Bercovitch, *The Structure and diversity of mediation in international relations*, 20.

<sup>52</sup> Jacob Bercovitch., 14-15.

Jacob Bercovitch menunjukkan “Kerangka Strategi Model Mediasi” yang digambarkan melalui bagan 1.1. Mediasi digambarkan sebagai proses yang dinamis di mana konteks, proses dan hasil adalah variabel inti. Variabel pertama adalah **konteks**, konteks merupakan karakteristik dari pihak yang berkonflik, yang meliputi sifat dari isu-isu yang berkembang, sifat konflik, serta sifat dari pihak yang terlibat dalam konflik dan sifat dari hubungan pihak yang berkonflik. Variabel kedua adalah **proses**, proses mediasi lebih terfokus pada identitas dan prestasi atau kemampuan mediator. Perilaku pihak-pihak yang terlibat serta strategi dari mediator dalam menjalankan dialog juga akan mempengaruhi proses. Variabel ketiga adalah **hasil**, hasil dari mediasi tergantung dari bagaimana proses mediasi berjalan dan hasil (keberhasilan atau kegagalan) mediasi didasarkan pada interaksi antara konteks dan proses.<sup>53</sup>

Konteks merupakan variabel yang kompleks di mana terdapat berbagai faktor yang akan mempengaruhi mediasi seperti pihak yang berkonflik yaitu Pemerintah Sri Lanka dan LTTE, dinamika hubungan antara Pemerintah Sri Lanka dan LTTE, pihak yang menjadi mediator yang dalam kasus ini adalah Norwegia, atau faktor lain seperti institusi politik dan tekanan ekonomi yang di dalamnya juga terdapat kepentingan dan harapan. Agar proses mediasi berjalan efektif, mediasi harus dapat mempengaruhi sistem konflik yang lebih luas (konteks). Ini merupakan salah satu alasan kenapa mediator menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dan menekankan aspek-aspek yang berbeda. Oleh karena itu, keliru jika menganggap bahwa mediasi hanya terkait dalam prosesnya

---

<sup>53</sup> Jacob Bercovitch dan Allinson Houston, *The Study of International Mediation: Theoretical Issues and Empirical Evidence*, (USA: Lynne Rienner Publishers, 1995).

saja, namun banyak faktor-faktor pendukung lainnya yang akan mempengaruhi jalannya mediasi.

Strategi dan sikap mediator berbeda-beda dalam tiap kasusnya, hal tersebut bukan karena perbedaan aktor, tetapi lebih pada konteks konflik. Dalam menjalankan perannya, mediator menerapkan suatu strategi untuk mencapai tujuannya. Strategi mediasi merupakan keseluruhan rencana, pendekatan atau metode yang digunakan oleh mediator untuk menyelesaikan konflik.<sup>54</sup> Proses (dialog dalam mediasi) dan konteks (konflik) saling berkaitan erat. Faktor-faktor dari konteks mempengaruhi pilihan dan keragaman strategi mediasi dalam kerangka umum yang mengatur dimensi dan proses mediasi.<sup>55</sup> Mediator diperlukan untuk membawa pihak yang bertentangan untuk duduk bersama dalam meja perundingan. Dalam proses mediasi, Norwegia sebagai mediator dapat memainkan berbagai strategi untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam mediasi, strategi mediasi dibagi dalam tiga jenis yaitu strategi komunikasi-fasilitasi, strategi formulasi dan strategi manipulasi.<sup>56</sup>

### **1. Strategi komunikasi dan fasilitasi**

Strategi komunikasi dan fasilitasi menekankan peran mediator yang relatif pasif, pada strategi ini mediator membuat kontak antara kedua pihak yang berkonflik, mencoba mendapatkan kepercayaan, dan mengatur

---

<sup>54</sup> Jacob Bercovitch, *The Structure and Diversity of Mediation in International Relations*, edit by Jacob Bercovitch and Jeffrey Z. Rubbin in *Mediation in International Relations: Multiple Approaches to Conflict Management*, (New York, Palgrave Macmillan: 2006), 16.

<sup>55</sup> Ibid., 18-19.

<sup>56</sup> Sandia Touval dan William Zartman, dalam *International Mediation Theory and Practice* dalam *The Structure and Diversity of Mediation in International Relations*, edit by Jacob Bercovitch and Jeffrey Z. Rubbin in *Mediation in International Relations: Multiple Approaches to Conflict Management*, (New York, Palgrave Macmillan: 2006), 17-18.

komunikasi antarpihak yang berkonflik tetapi tidak membuat input, hanya sekedar mengatur jalannya komunikasi. Mediator harus bersikap netral sehingga kedua belah pihak merasa yakin untuk ikut terlibat. Mediator kemudian mengatur jalannya interaksi antarpihak yang bertikai dengan mengidentifikasi berbagai isu dan kepentingan. Mediator juga menyediakan berbagai informasi serta mengembangkan suatu kerja sama agar kepentingan semua pihak dapat dibahas.<sup>57</sup> Jadi pada tahap ini, mediator yaitu Pemerintah Norwegia menjalankan perannya dalam menjalin komunikasi secara terpisah dengan Pemerintah Sri Lanka dengan tujuan agar kedua pihak tersebut setuju untuk ikut terlibat pada proses perdamaian selanjutnya.

## 2. Strategi formulasi

Strategi formulasi dimulai dengan memilih tempat untuk pertemuan dengan pihak yang berkonflik. Mediator pada strategi ini juga menyarankan prosedur seperti apa yang akan dijalankan sehingga dapat menyoroti kepentingan umum serta dapat mengurangi ketegangan. Mediator juga mengontrol waktu dan menangani permasalahan yang paling sederhana terlebih dahulu. Strategi formulasi memerlukan keaktifan dari mediator yang dapat mengendalikan suasana perundingan tetapi tidak mengusulkan solusi dari permasalahan.<sup>58</sup>

Saat komunikasi antarpihak mulai terjalin, maka Norwegia mulai bergerak untuk mengajak pihak yang berkonflik untuk melakukan pertemuan formal sekaligus memilihkan tempat netral untuk pertemuan serta

---

<sup>57</sup> Ibid., 17.

<sup>58</sup> Ibid.

menyarankan bentuk prosedur apa yang akan dijalankan dalam perundingan yang akan dijalankan sehingga suasana perundingan akan dijalankan dapat berlangsung dengan lancar.

### 3. Strategi Manipulasi

Strategi manipulasi adalah strategi yang paling aktif dari ketiga strategi yang dijalankan mediator. Mediator dapat mengajukan solusi dalam penyelesaian konflik, menjanjikan sumber daya seperti bantuan dana dan dapat mengancam melakukan penarikan bila mediasi berjalan tidak lancar yang disebabkan oleh salah satu pihak yang berkonflik serta menawarkan misi pemantauan bila kesepakatan damai berhasil dibuat.<sup>59</sup>

Pada strategi ini mediator mulai mengubah pandangan pihak yang berkonflik baik mengenai isu maupun mengenai lawannya, mediator juga menyampaikan saran-saran yang substantif. Mediator harus menyaring berbagai informasi yang akan disampaikan serta merancang suatu kerja sama untuk hasil yang dapat diterima bersama. Mediator juga dapat menekan pihak yang berkonflik untuk menunjukkan fleksibilitas dan komitmennya dalam proses perdamaian.<sup>60</sup> Pada tahap ini, Norwegia dapat memainkan keahliannya dalam proses mediasi, seperti menjanjikan sumber daya dalam bentuk bantuan dana. Norwegia juga dituntut untuk lebih aktif pada tahap ini karena dapat memberikan saran-saran yang substantif. Jika perundingan berjalan lancar, Norwegia juga dapat merancang kerja sama untuk hasil yang dapat diterima oleh Pemerintah Sri Lanka dan LTTE.

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid., 18.

Sumber daya yang dimiliki oleh mediator juga mempengaruhi proses mediasi. Sumber daya adalah faktor penentu kemampuan mediator untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya sumber daya yang dimiliki oleh mediator, tidak mungkin tercapai tujuan apapun dalam mediasi. Dalam konteks hubungan sukarela seperti mediasi, sumber daya dapat membentuk peluang dan tindakan yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku atau persepsi pihak yang berkonflik. Sumber daya itu termasuk uang, status, keahlian, akses dan prestise yang dimiliki oleh mediator. Sumber daya yang spesifik dapat digunakan dalam situasi tertentu, tergantung pada sifat mediator dan konteks sosial dari mediasi. Apapun jenis sumber daya yang digunakan, sumber daya ini dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi strategi mediasi dan perilaku yang akan menentukan hasil dari mediasi.<sup>61</sup>

Selain strategi yang digunakan oleh Norwegia dalam proses mediasi, sumber daya yang dimiliki oleh Norwegia juga akan mempengaruhi jalannya mediasi. Selain itu, keahlian wakil-wakil Norwegia akan mempengaruhi mediasi. Banyaknya investasi yang ditanamkan Norwegia di Sri Lanka tentunya akan mempengaruhi langkah yang diambil oleh Pemerintah Sri Lanka dalam proses mediasi tersebut.

Keseluruhan konteks dan strategi mediasi yang digunakan oleh mediator dalam menjalankan perundingan akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai. Keberhasilan atau kegagalan tersebut dapat dilihat dari bagaimana konteks konflik dapat berubah dan telah disepakatinya kesepakatan damai antara pihak yang berkonflik. Jadi keberhasilan atau kegagalan Norwegia sebagai mediator

---

<sup>61</sup> Ibid., 19.



tidak hanya tergantung pada kemampuan wakil-wakil Norwegia, namun juga dipengaruhi oleh keseluruhan konteks didalamnya.

## 1.8 Metodologi Penelitian

### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Setiap penelitian yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis mengenai pencarian fakta yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data-data yang dikumpulkan dari berbagai macam sarana. Penelitian kualitatif berusaha membangun realitas dan memahami realitas tersebut sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.<sup>63</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis strategi Norwegia dalam proses mediasi konflik bersenjata antara Pemerintah Sri Lanka dengan *Liberation Tiger of Tamil Eelam* (LTTE) adalah deskriptif analisis, analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat menjadi lebih rinci dengan mendiskripsikan ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok, organisasi maupun negara,<sup>64</sup> sehingga dalam melakukan penelitian, peneliti harus bersikap objektif dalam menginterpretasikan semua data yang didapatkan dari berbagai sumber.

---

<sup>62</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Jurnal Social Humanoiora* Vol. 9. No. 2, 2005, 58.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

## 1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan waktu yang digunakan untuk menganalisis strategi Norwegia dalam proses mediasi adalah dari tahun 2002 saat kesepakatan gencatan senjata ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berkonflik hingga tahun 2009 ketika mediasi berakhir. Peneliti juga menambahkan literatur sejarah untuk melihat dinamika hubungan antara kedua belah pihak sebelum dan sesudah kemerdekaan Sri Lanka, dari kecemburuan antaretnis Sinhala dan Tamil hingga konflik bersenjata antara Pemerintah dan LTTE, sehingga dalam penelitian ini akan dicantumkan aspek sejarah antara kedua belah pihak tersebut.

## 1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis (variabel dependen) merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dan dianalisis. Variabel ini merupakan akibat dari kekuatan dan pengaruh dari variabel lain.<sup>65</sup> Variabel yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisa (variabel dependen) disebut sebagai unit eksplanasi (variabel independen). Variabel independen lebih dahulu terjadi daripada variabel dependen. Secara umum variabel independen disebut sebagai variabel penyebab dan variabel dependen sebagai variabel akibat.<sup>66</sup> Tingkat analisa merupakan area dimana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisis dalam Studi Hubungan Internasional membantu di tingkat mana analisa dalam penelitian ini akan ditekankan.<sup>67</sup> Unit analisa penelitian ini adalah Norwegia, sedangkan unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah konflik

<sup>65</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3E: Yogyakarta, 1990), 108.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid., 35.

bersenjata antara Pemerintah Sri Lanka dengan *Liberation Tiger of Tamil Eelam* (LTTE) dengan tingkat analisisnya yaitu negara.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan mempelajari informasi berupa data yang didapat dari berbagai tempat. Penelitian ini menggunakan data campuran yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui laporan-laporan berupa dokumen-dokumen dari situs resmi Kedutaan Besar Norwegia di Sri Lanka yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis.

Data sekunder didapatkan dari beberapa sumber tertulis yang digunakan seperti buku, jurnal ilmiah dan laporan penelitian untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, situs berita internasional serta nasional juga dijadikan sebagai sumber data yang juga membahas mengenai proses perdamaian antara kedua belah pihak.

#### 1.8.5 Teknik Analisa

Analisa data merupakan suatu proses penyusunan data oleh peneliti untuk membuat sebuah penjelasan atau objek secara logis dan sistematis.<sup>68</sup> Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dijabarkan ke dalam unit-unit dan kemudian disusun kedalam pola dan memilih mana yang paling penting dan dapat membantu untuk menjawab permasalahan yang ada. Analisa strategi Norwegia dalam mediasi konflik bersenjata antara Pemerintah Sri Lanka dan LTTE akan menggunakan Kerangka Strategi Model Mediasi oleh Jacob Bercovith. Analisa

---

<sup>68</sup> Barbara D. Kawulich, *Data Analysis Technique in Qualitative Research*, (State University of Georgia: Georgia), 97.

dimulai dengan melihat bagaimana konteks konflik di Sri Lanka berkembang, setelah itu strategi mediasi yang diterapkan oleh Norwegia dapat dilihat dari tiga konten yaitu fasilitasi-komunikasi, formulasi dan manipulasi. Strategi yang dipilih oleh mediator berdasarkan pengalaman dan kemampuan mediator serta sumber daya yang dimiliki. Setelah itu, hasil (keberhasilan atau kegagalan) akan dianalisis berdasarkan adanya perubahan konteks dari konflik serta berhasilnya dibuat kesepakatan damai atau tidak.

## 1.9 Sistematika Penulisan

### BAB I

#### **Pendahuluan.**

Pengantar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual yang akan dipakai untuk menganalisa masalah dalam penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Menggambarkan secara keseluruhan permasalahan yang akan diteliti.

### BAB II

#### **Konteks Konflik: Dinamika konflik antara Pemerintah Sri Lanka dengan *Liberation Tiger of Tamil Eelam (LTTE)*.**

Bab ini menjelaskan bagaimana dinamika konflik bersenjata antara gerakan separatis LTTE dengan Pemerintah Sri Lanka yang akhirnya menimbulkan konflik bersenjata antara kedua belah pihak yang juga menimbulkan banyak korban jiwa serta usaha perdamaian yang dilakukan oleh Pemerintah Sri Lanka dan LTTE sebelum keterlibatan Norwegia.

**BAB III Identitas Mediator: Kebijakan luar negeri Norwegia dalam promosi perdamaian.**

Bab ini menjelaskan promosi perdamaian sebagai bidang yang berkembang dalam aktivitas kebijakan luar negeri Norwegia serta hubungan antara Pemerintah Sri Lanka dengan Pemerintah Norwegia sehingga Pemerintah Norwegia bersedia untuk menjadi mediator dalam konflik tersebut.

**BAB IV Analisis strategi Norwegia dalam mediasi konflik bersenjata antara Pemerintah Sri Lanka dengan *Liberation Tiger of Tamil Eelam* (LTTE).**

Bab ini menganalisa mengenai bagaimana strategi Norwegia dalam mediasi konflik bersenjata antara Pemerintah Sri Lanka dengan *Liberation Tiger of Tamil Eelam*. Hal yang akan disoroti adalah bagaimana mekanisme mediasi yang terjadi serta tantangan yang dihadapi Norwegia dalam proses perundingan hingga tahun 2009.

**BAB V Penutup.**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang diangkat.

